

# GLOBALISASI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI EKONOMI DAN POLITIK

Asep Kamaluddin Nashir  
(Dosen HI-FISIP UPN "Veteran" Jakarta)

## Abstract

*The relation of international economical and democracy in globalization era is indeed very closed Both of them have causal inter-influencing and dynamic in their natures. Globalization encompasses changes in the field of economic and social combined with interconnectedness between regional and global uniqueness, that all together challenge and reform a political community, especially in the form of modern state.*

**Keyword: globalization, democracy, economy, politic**

## PENDAHULUAN

Globalisasi bukan merupakan hal baru, tetapi proses evolusi yang telah berlangsung sepanjang peradaban manusia manusia. Dimulai dengan pelayaran-pelayaran yang menemukan benua-benua antara Asia dengan Eropa, hingga saat ini perkembangan teknologi informasi telah mempermudah komunikasi setiap orang dari belahan dunia manapun. Sering dengan perkembangan yang terjadi di tingkat global, perebatan mengenai globalisasipun juga berkembang, menghasilkan pro dan kontra, sekaligus skeptisisme. Pada satu sisi, dipandang sebagai sebuah kemajuan dalam pengembangan teknologi dan peradaban umat manusia, pada sisi lain, dilihat sebagai ancaman besar bagi tatanan kehidupan dan peradaban manusia.

Bagi para pendukungnya globalisasi ekonomi akan mendorong kemajuan ekonomi dan juga akan mendorong proses demokrasi. Seperti yang dikemukakan Hayek (David Held ; 1995 ) pasar tidak selalu beroperasi sempurna, tetapi keuntungannya secara radikal lebih banyak daripada kerugiannya. Lebih lanjut Friedman mengatakan sistem pasar menjadi dasar bagi

tatanan yang bebas, sebab kebebasan ekonomi merupakan 'syarat esensial bagi kebebasan politik'.

Globalisasi dan Demokrasi mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Hubungan diantara keduanya telah menjadi subyek penelitian bagi banyak ilmuwan. Di satu sisi banyak peneliti meyakini bahwa arus globalisasi membawa dampak demokratisasi bagi banyak Negara-negara yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan rezim otoriter, di sisi yang lain globalisasi menjadi ancaman bagi demokrasi sejati oleh kepentingan rezim keuangan global yang ingin menguasai ekonomi sebuah Negara yang kaya akan sumber daya alam.

## Kerangka Konseptual Globalisasi

Globalisasi" diambil dari kata *global*, yang bermakna *universal*. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di

dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama.

Selanjutnya perlu dipahami bahwa Diskursus mengenai globalisasi bisa mengambil benang merah dengan kata kunci sebagai berikut "kemajuan ekonomi", "kemajuan teknologi informasi", "kemajuan ilmu pengetahuan", "kemajuan peradaban", ruang dan waktu tidak lagi menjadi tembok besar yang menghalangi terjadinya proses komunikasi dan diseminasi informasi, demikina pula dengan pergerakan arus modal di wilayah ekonomi.

Globalisasi adalah sebuah proses perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang regional dan global yang unik. Globalisasi mampu mengubah pola

hubungan antara Negara dan pasar (David Held, 2000). Perubahan-perubahan ini merupakan transformasi struktural. Perubahan yang dimaksud di antaranya adalah rezim hak asasi manusia, yang memastikan bahwa kedaulatan nasional tidak dapat menjamin legitimasi suatu negara dalam hukum internasional; pergeseran lingkungan, dalam bentuk pemanasan global akibat kebocoran lapisan ozon; revolusi di bidang komunikasi dan teknologi informasi.

Yasraf Amir Piliang menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu paradoks, tercipta sebagai akibat hadirnya secara bersamaan dalam ruang dan waktu yang sama dua sifat yang saling bertentangan satu sama lain secara kontradiktif, globalitas-lokalitas, homogenisasi-heterogenisasi. Ia melihat bahwa globalisasi menciptakan dunia tanpa batas, masyarakat terbuka dan pasar bebas, namun di sisi lain menimbulkan berkembangnya separatisme, otonomi, dan desentralisasi. ( Yasraf Amir Piliang ; 2004)

Anthony Giddens memberikan sebuah ilustrasi sederhana mengenai pandangannya tentang globalisasi, globalisasi merujuk pada sebuah perubahan dalam bentuk spasial dari pengaturan dan aktivitas manusia sampai kepada pola aktivitas pada tingkat transkontinental dan intra-regional. Termasuk di dalamnya perluasan dan penajaman hubungan-hubungan sosial dan institusi-institusi yang melampaui ruang dan waktu, sebagaimana, pada satu sisi terjadinya

peningkatan dalam aktivitas sehari-hari yang dipengaruhi oleh *event-event* yang berlangsung di belahan dunia yang lain; dan pada sisi yang lain praktek-praktek maupun keputusan-keputusan kelompok-kelompok atau komunitas lokal bisa memiliki gaung yang signifikan secara global (Anthony Giddens,; 1990 ) Giddens melihat globalisasi sebagai sebuah bentangan proses yang kompleks dan digerakkan oleh berbagai pengaruh. Globalisasi telah mengubah kehidupan manusia sehari-hari, terutama di negara-negara berkembang, sekaligus secara bersamaan menciptakan sistem-sistem dan kekuatan-kekuatan trans-nasional baru. Globalisasi bukan semata-mata kebijakan-kebijakan kontemporer, tetapi justru mentransformasikan institusi-institusi masyarakat di mana masyarakat itu berada. (Anthony Giddens,; 1999 )

David held mengelompokkan menjadi 3 dalam melihat globalisasi (David Held ; 1999), yaitu kelompok hiperglobalis, kelompok transformasionis dan kelompok skeptis. Kelompok hiperglobalis menganggap bahwa globalisasi adalah proses yang baru sama sekali, yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini saja, dan telah mengubah dunia secara total dan radikal. Ia telah menghancurkan kebudayaan - kebudayaan lokal, merobek pasar-pasar di belahan dunia mana pun, dan merobohkan dinding-dinding batas antarnegara. Buku *The End of Nation State* karya Kenichi Omahe sering dipakai

sebagai manifesto para hiperglobalis. Globalisasi membuat peran negara perlahan terkikis dengan adanya jaringan-jaringan produksi internasional, seperti multinational corporations (MNC) dan transnational corporations (TNC). Negara seolah tidak berdaya sebagai penentu kebijakan dengan datangnya tekanan-tekanan dari kekuatan MNC dan TNC tersebut. Hingga pada kesimpulan akhir yang menyatakan bahwa kemunculan ekonomi global dan lembaga-lembaga governance global, serta penyebaran budaya merupakan fenomena baru dalam dunia.

Posisi tengah diambil oleh David Held (*Global Transformation*, 2000) sebagai kelompok "transformatif." Benar globalisasi telah terjadi pada masa lampau, tetapi globalisasi yang sekarang tidak bisa dibandingkan dengan yang masa lampau. Tiga faktor yang membedakan: *velocity*, *intensity*, dan *extensity* .( I Wibowo ; 2002)

Para transformasionis mempunyai keyakinan bahwa globalisasi dewasa ini telah menemfatkan kembali kekuasaan, fungsi, dan pemerintahan nasional. Salah satu poin pentingnya adalah negara tidak mampu lagi berlindung di bawah klaim kepentingan nasional

Yang terakhir adalah kelompok skeptis, dalam pandangan kelompok- ini globalisasi dianggap bukan merupakan fenomena baru, tetapi mempunyai akar sejarah yang panjang. Pandangan kelompok

ini sangat bertentangan dengan kelompok hiperglobalis. Menurut kaum skeptis kekuatan-kekuatan global sangat bergantung kepada pemerintahan nasional untuk menjamin liberalisasi ekonomi terus berlanjut.

Globalisasi juga memberikan dampak kompetisi yang sangat signifikan dalam hal ini kompetisi menjadi nilai sentral. Kompetisi dianggap menjadi strategi yang terbaik guna meraih profit maksimal sekaligus mendapat alokasi sumber daya secara optimal. Prinsipnya, *one person's crisis is another person's opportunity for enrichment*. Dalam hegemoni ekonomi pasar, perilaku yang didasarkan solidaritas dianggap sebagai sikap yang merugikan.

"Rather than encompassing everyone in a collective march toward a better life, globalization is a process that allows the world market economy to 'take the best and leave the rest'." (Susan George ; 2006)

Dalam perspektif neoliberal, Globalisasi sarat dengan hiperkompetisi langsung, bahkan antara orang-orang yang tak pernah bertemu sekalipun. Mengikuti petuah Thomas Hobbes, *every man is enemy to every man*. Kanibalisme hukum rimba berlaku secara brutal dan kejam. Siapa kuat, dia menang. Sistem ekonomi pasar hanya mengambil yang terbaik dan meninggalkan sisanya, menciptakan para pecundang ketimbang pemenang. (Imam Cahyono ; 2002)

Oleh karena itu, perlu adanya langkah logis dalam menyikapi hegemoni globalisasi.

Setidaknya kita dapat meminjam tiga langkah Jacques Lacan, ia menyebutnya sebagai 'kritik kebudayaan psikoanalisis'. *Pertama*, upaya mengidentifikasi suatu pengaruh yang jelas, bersifat kolektif dan subyektif yang dihasilkan pada sejumlah orang tertentu melalui suatu artefak kebudayaan atau diskursus. Yaitu dengan memindai tanggapan sejumlah besar publik yang menghasilkan tindakan-tindakan dan perasaan yang identik sama. *Kedua*, mengidentifikasi unsur-unsur diskursus yang bertanggungjawab demi tampilnya pengaruh-pengaruh yang muncul, yang diidentifikasi dalam langkah pertama. Kemudian yang *ketiga* adalah langkah yang berlangsung serentak dengan langkah kedua, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor subyektif yang tidak tampil – hasrat dan kandungan tertentu dari Imajiner, Simbolik, dan Real – yang dimohonkan oleh unsur-unsur diskursif yang menghasilkan pengaruh yang tampil itu. (Mark Bracher ; 2005)

Berdasarkan langkah-langkah Lacan tersebut, terdapat sebuah teori yang menjadi landasan utama pemikiran penulis untuk menyikapi masalah globalisasi, yaitu teori Jürgen Habermas *Socio-Critical Hermeneutics*. Dalam teori kritiknya yang disebut sebagai *Socio-Critical Hermeneutics*, Jürgen Habermas membagi pengetahuan menjadi tiga kategori. Pertama, *instrumental knowledge* atau positivisme, yang menjadikan tujuan pengetahuannya sebagai sarana untuk mengontrol, memprediksi, memanipulasi, dan mengeksploitasi obyeknya. Kedua, *hermeneutic knowledge* atau *interpretative knowledge*, yang menjadikan tugas ilmu pengetahuan hanyalah untuk memahami belaka. Ketiga, *critical knowledge* atau *emancipatory knowledge*, yakni suatu pendekatan yang

menempatkan ilmu pengetahuan sebagai katalis untuk membebaskan pengetahuan manusia. (Anthony C. Thiselton ; 1992) Dalam sebuah konteks, Hermeneutika Sosio-Kritik dapat menjadi alat yang potensial bagi pembebasan (*liberation*) dan mengungkapkan kembali kebenaran, juga sebagai sebuah senjata dalam menghadapi kecurangan diri yang terdapat dalam individu manusia dan kelompok. Hal ini tidak hanya menuntun pada pembebasan diri, tetapi juga pembebasan terhadap teks. (Anthony C. Thiselton ; 1992)

### Globalisasi dan Demokrasi Ekonomi

Keterkaitan antara globalisasi dan perkembangan ekonomi sebuah negara adalah hal yang tidak dapat disangkal lagi. Isu tentang perlunya atau sebaliknya tentang tidak perlunya campur tangan pemerintah dalam perekonomian telah menjadi perdebatan yang belum juga usai. Sebenarnya dalam sistem demokrasi liberal di bidang ekonomi yang disebut juga sistem ekonomi liberal, Negara juga mempunyai peran tertentu. Tetapi perannya adalah menjamin berlakunya mekanisme pasar atau kebebasan ekonomi. Di samping itu Negara berperan dalam mencegah monopoli, kartel dan trust, mencegah dampak merusak dari faktor-faktor luar yang merugikan (*extehalities*), menyediakan kebutuhan umum (*public goods*), penegakkan hukum dan terjaminnya *rule of law*, bertindak sebagai wasit yang netral dan mengoreksi informasi yang bias dan tidak merata atau memperbaiki pasar yang tidak sempurna (*inperfection of market*). Peran Negara seperti itulah yang dianggap bisa menjamin berlangsungnya kehidupan demokrasi.

Dalam paham demokrasi liberal, Negara adalah sebuah ruang publik yang netral yang bebas dari dominasi kelas atau kelompok kepentingan tertentu. Tapi sebaliknya berbagai kelompok masyarakat juga bebas dalam mempengaruhi kebijaksanaan Negara. Caranya adalah melalui proses demokrasi atau prosedur yang menjamin keadilan (*fairness*). Inilah yang disebut oleh filosof Amerika, Rawls sebagai *justice as fairness* yaitu suatu keadilan yang ditentukan oleh proses, yaitu proses yang mengikuti prosedur yang disepakati bersama. Prosedur tersebut memang bisa saja menghasilkan sesuatu yang berbeda pada setiap individu. Tetapi yang penting, semua hak-hak manusia dipenuhi. Namun jika prosedur itu merugikan golongan yang paling lemah, maka Negara boleh melakukan intervensi, sehingga suatu kemajuan tetap menguntungkan golongan yang paling lemah. Keadilan bisa disebut terwujud apabila golongan yang paling lemah ikut meningkat kesejahteraannya dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan ekonomi internasional, yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari Perusahaan-perusahaan Trans-nasional (*TNCs/ Trans National Corporations*) dengan dukungan Lembaga-lembaga Finansial Internasional (*IFIs/Intemational Financial Institusions*) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (*WTO/World Trade Organization*).

Globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi tersebut mulai efektif berlaku secara global menjadi suatu mekanisme perdagangan mulai sejak ditandatanganinya kesepakatan

internasional tentang perdagangan pada bulan April 1994 setelah melalui proses yang sulit di Marrakesh, Maroko, yakni suatu perjanjian internasional perdagangan yang dikenal dengan GATT. GATT sesungguhnya merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah. GATT juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah, serta juga merupakan pengadilan dimana jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa bias diselesaikan. Kesepakatan itu dibangun di atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistem yang proteksionis, dan dibangun di atas keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara yang efektif dan efisien.

Pada tahun 1995 suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO didirikan, dan sejak saat itu dia mengambil alih fungsi GATT. WTO dirancang bukanlah sebagai organisasi *monitoring* bagi negara-negara yang tidak mematuhi GATT, akan tetapi WTO bertindak berdasar komplain yang diajukan oleh anggotanya. Dengan demikian WTO merupakan salah satu aktor dan arena forum perundingan antar perdagangan dari mekanisme globalisasi yang paling penting.

### **Globalisasi dan Demokrasi Politik**

Di dalam ranah politik, globalisasi mampu menembus sekat-sekat yang selama ini membelenggu hubungan antar individu. Dalam proses ini, sebuah tindakan pada level lokal dapat membawa akibat yang melampaui batas-batas fisik sehingga ia memengaruhi apa yang terjadi di belahan lain dunia. Dalam rumusan David Held

(1995), globalisasi setidaknya tercermin pada dua fenomena yang memiliki pengaruh nyata. *Pertama*, melonggarnya rantai-rantai yang membelenggu aktivitas politik, ekonomi, dan sosial sehingga sekup semua aktivitas tersebut kini membentang seluas dunia. *Kedua*, semakin intensnya tingkat interaksi dan ketersalinghubungan di dalam dan di antara negara-negara serta masyarakat. Sebenarnya dua hal yang disebut oleh Held di atas tidak bisa dipahami secara terpisah. Interkoneksi di antara dua hal itu sangat kuat sehingga mustahillah memahami intensitas hubungan di antara warga dunia tanpa mengandaikan melonggarnya sekat-sekat yang sebelumnya membelenggu keleluasaan dalam berkomunikasi, demikian pula sebaliknya. Perdebatan yang muncul berkaitan hubungan globalisasi dan demokrasi bermula pada dua persoalan yang bertolak belakang. Pendapat pertama mengatakan bahwa globalisasi mengancam demokrasi. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa globalisasi mengembangkan demokrasi.

Untuk mengukur hal itu tergantung pada seberapa besar ruang gerak yang diberikan globalisasi kepada demokrasi. Di sini, ada dua kriteria yang dapat diajukan, yakni konsep otonomi dan kesetaraan. Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas diantara individu dan masyarakat. Jika globalisasi ternyata mampu mendorong otonomi dan kesetaraan yang lebih luas, maka globalisasi dianggap akan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi. Sebaliknya, jika globalisasi justru menghambat kedua hal tersebut,

maka globalisasi dapat dianggap sebagai ancaman bagi demokratisasi politik.

Menurut David Held, prinsip otonomi merupakan inti proyek demokrasi. Pandangan mengenai negara legal demokratis adalah dasar untuk memecahkan ketegangan yang muncul antara gagasan negara modern dan gagasan demokrasi. Dalam konteks itu, demokrasi kosmopolitan merupakan suatu konsepsi hubungan legal demokratis yang disesuaikan secara tepat dengan dunia bangsa-bangsa yang terjerat dalam jaringan proses regional dan global (Held 1995).

Ketiga konsep ini (prinsip otonomi, negara legal demokratis, dan demokrasi kosmopolitan) merupakan suatu kerangka kerja baru yang tidak bisa dipungkiri bagi pengembangan suatu teori demokrasi. Jika demokrasi berarti "pemerintahan oleh rakyat", yakni penentuan pembuatan keputusan publik oleh anggota-anggota komunitas politik yang sama-sama bebas, maka dasar penubuhannya terletak pada kemajuan dan peningkatan otonomi.

Untuk memperkuat kesalingterhubungan antara globalisasi dan demokratisasi Kita dapat merujuk pada apa yang disebut oleh (Samuel P Huntington; 1995) sebagai 'Gelombang Demokratisasi Ketiga', yang secara mengejutkan justru berawal dari kudeta para perwira militer Portugal terhadap kekuasaan diktator Marcello Caetano pada 1974. Inilah masa persemiaan baru gagasan demokrasi – setelah ia sempat mekar lalu menguncup, kemudian mekar dan menguncup kembali – dalam perjalanan panjang peradaban sejak akar demokrasi modern itu mulai tumbuh seiring keberhasilan Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika pada abad kedelapanbelas.

Di awal tahun 1990-an, dunia menyaksikan keruntuhan Uni Soviet, yang menjadi ancaman utama sistem demokrasi liberal. Saat ini dunia menyaksikan runtuhnya rezim-rezim penguasa di jazirah arab, atau biasa disebut dengan *arab spring*. Tunisia adalah tempat kelahiran 'badai revolusi' yang mengguncang wilayah Timur Tengah dan menjatuhkan sejumlah penguasa diktator. Aksi bakar diri yang dilakukan Muhammad Bouazizi menyebabkan protes massa yang menyebabkan mantan presiden Tunisia, Zainal Abidin Bin Ali meninggalkan negara tersebut. Gelombang revolusi tersebut menjalar ke seluruh jazirah arab.

Ketika menjelaskan gelombang baru ini, Huntington menyebut bahwa *demonstration effect* merupakan salah satu penyebab penting yang melahirkan gairah demokrasi di berbagai negara. Informasi tentang peristiwa politik di suatu negara dapat menyebar secara cepat ke negara-negara lain sehingga dampaknya tidak cuma dirasakan oleh penduduk satu negara, pemikiran seorang ahli politik atau naskah pidato seorang pejuang demokrasi diakses oleh orang-orang di tempat yang berlainan seolah mereka sedang mendengarkan ceramah itu langsung di hadapan mereka. Tidak mengherankan jika kemudian muncul 'efek meniru' apa yang dilakukan oleh pihak lain di tempat yang berbeda.

### Kesimpulan

Hingga hari ini globalisasi masih menyisakan ruang perdebatan, belum akan menemukan titik akhir, titik kesepahaman. Memang tidak penting untuk memaknai globalisasi dalam satu pemahaman tunggal, globalisasi tetap menjadi ruang diskursif, ruang di

mana diskursus berkontestasi dari gagasan sampai praktek politik. Namun setidaknya sketsa umum mengenai wajah globalisasi bisa direka, dan dilihat dalam praktek ekonomi-politik di tingkat dunia.

Diluar perdebatan mengenai globalisasi, sesuatu yang pasti bahwa arus demokratisasi yang sedang berjalan saat ini dan akan terus berjalan tidak dapat terlepas dari globalisasi. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah; apakah globalisasi memberikan sumbangan positif bagi demokrasi, atau sebaliknya menciptakan kemunduran demokrasi. Bagi penulis, globalisasi akan menyumbangkan dua sisi sekaligus, yakni mendorong proses demokratisasi dan sekaligus menciptakan krisis bagi demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity* (Cambridge: Polity Press, 1990)
- Anthony Giddens, *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1999)
- Anthony C. Thiselton, *New Horizons in Hermeneutics* (Michigan: Zondervan Publishing House, 1992)
- David Held, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Standford University Press, 1995
- David Held "Global Transformations: Politics, Economic, and Culture", terbitan Stanford University Press, California, 1999
- I Wibowo, Globalisasi dan Kapitalisme Global, Kompas 2 April 2002
- Mansour Fakih, *Jalan Lain : Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Mark Bracher, *Jacques Lacan, Diskursus, dan Perubahan Sosial: Pengantar Kritik-Budaya Psikoanalisis*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), hlm. 106-109, (terj.)
- Gunawan Admiranto, judul asli: *Lacan, Discourse, and Social Change: A Psychoanalytic Cultural Criticism*.
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*; Pustaka Utama Grafiti; 1995
- Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*, Jalasutra, 2004
- <http://kompas.com/kompas-cetak/0702/15/opini/3284813.htm>
- <http://www.ru.org/susan-george.htm>